



Transformasi Digital Sistem Penerimaan Kas dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Aplonia Atto^{1*}, Marselinda Hege², Kretisana Jagi³

Corresponding Author's e-mail : amkeni.atto78@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:
17 March 2026
Manuscript revised:
15 April 2026
Accepted for publication:
19 May 2026

Keywords

Digital Transformation,
Cash Receipts System,
Financial Transparency,
Financial Accountability,
Information Technology,
Public Sector

Kata Kunci

Transformasi Digital,
Sistem Penerimaan Kas,
Transparansi Keuangan,
Akuntabilitas Keuangan,
Teknologi Informasi,
Sektor Publik

Abstract

Digital transformation in public sector financial management has become an essential strategy for enhancing transparency and accountability. This study aims to analyze the implementation of an information technology-based cash receipts system and its contribution to supporting financial transparency and accountability at the Kupang Religious High Court. The research employed a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving personnel responsible for financial management. Data analysis was conducted using thematic coding, including open coding, axial coding, and selective coding, to identify key themes emerging from the findings. The results indicate that the implementation of a technology-based cash receipts system strengthens internal control mechanisms, improves administrative and transaction documentation practices, enhances accessibility to financial information, and supports public information disclosure. Furthermore, the utilization of information technology facilitates a clearer segregation of duties and responsibilities in cash management processes, thereby improving institutional accountability. The findings demonstrate that the digital transformation of the cash receipts system plays a significant role in promoting financial transparency and accountability through reliable information reporting, effective monitoring, and more open communication with stakeholders and the public.

Abstrak

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi serta kontribusinya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *thematic coding* melalui tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi mampu memperkuat pengendalian

¹ Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia

internal, meningkatkan ketertiban administrasi dan dokumentasi transaksi, memperluas akses informasi keuangan, serta mendukung keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi membantu memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan kas sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga. Temuan penelitian menegaskan bahwa transformasi digital sistem penerimaan kas berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui penyajian informasi yang andal, pengawasan yang efektif, serta komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the BY-NC-ND license



Contents

Abstract	933
Introduction	934
Methods.....	936
Results and Discussions.....	936
Conclusion.....	939
Reference	939

III

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi tata kelola organisasi sektor publik dalam beberapa dekade terakhir. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, digitalisasi dipandang sebagai mekanisme penting untuk mempercepat proses kerja, memperluas akses informasi, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Khan et al., 2021; Hochstetter et al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan, transparansi merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan informasi sehingga setiap aktivitas keuangan dapat diketahui, dipahami, dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan (Androniceanu, 2021; Sari & Muslim, 2023).

Salah satu komponen penting dalam sistem keuangan organisasi adalah sistem penerimaan kas. Kas merupakan aset yang paling likuid sehingga memiliki tingkat risiko penyalahgunaan yang lebih tinggi dibandingkan aset lainnya. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem penerimaan kas yang mampu menjamin keamanan aset, ketepatan pencatatan transaksi, serta penyediaan informasi keuangan yang andal. Menurut Mulyadi (2016), sistem penerimaan kas yang efektif harus didukung oleh prosedur yang jelas, dokumentasi yang memadai, pemisahan fungsi, dan pengendalian internal yang mampu meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Hal ini sejalan dengan temuan Pertiwi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang memadai dapat membantu organisasi dalam mengelola, mencatat, memproses, dan mengawasi transaksi penerimaan kas secara lebih tertib sehingga mendukung efektivitas pengendalian internal.

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak organisasi beralih dari sistem pencatatan manual menuju sistem informasi akuntansi berbasis digital. Digitalisasi sistem penerimaan

kas memungkinkan proses pencatatan transaksi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain meningkatkan efisiensi operasional, penerapan teknologi informasi juga mampu memperkuat pengendalian internal melalui jejak audit (*audit trail*), pembatasan akses pengguna, otorisasi transaksi, dan integrasi data keuangan secara lebih real time. Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan melalui proses pengolahan data yang lebih efektif, akurat, dan relevan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor publik, digitalisasi akuntansi juga dinilai mampu memperkuat keterbukaan informasi keuangan, mempercepat penyajian laporan, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga kepada publik (Sari & Muslim, 2023; Lestari, 2025).

Meskipun demikian, implementasi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi sistem, lemahnya kontrol akses, kualitas infrastruktur digital yang belum merata, serta rendahnya kompetensi pengguna dapat mengurangi efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan (Khan et al., 2021; Sari & Muslim, 2023; Pertiwi et al., 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang transparan apabila tidak disertai standar prosedur, pengendalian internal, keamanan data, dan komitmen organisasi yang kuat (Matheus et al., 2021; Hochstetter et al., 2023). Sebagian besar penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas hubungan umum antara transformasi digital dan kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kontribusi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada organisasi sektor publik.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel. Komitmen tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis serta sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dalam lingkungan peradilan, prinsip keterbukaan informasi juga diperkuat melalui kebijakan Mahkamah Agung mengenai standar pelayanan informasi publik di pengadilan, termasuk penyediaan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan (Republik Indonesia, 2008; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Dalam pengelolaan keuangan, sistem penerimaan kas memegang peranan penting karena berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi, pengendalian internal, dan penyajian informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis transformasi digital sistem penerimaan kas dengan mengintegrasikan perspektif sistem informasi akuntansi, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan pengendalian internal pada lembaga peradilan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek efisiensi penggunaan teknologi informasi, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana sistem tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, keandalan pencatatan transaksi, efektivitas pengawasan internal, serta pertanggungjawaban keuangan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital sistem penerimaan kas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris

bagi penguatan tata kelola keuangan sektor publik, khususnya dalam membangun sistem penerimaan kas yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis transformasi digital sistem penerimaan kas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, praktik, dan mekanisme pengelolaan penerimaan kas berbasis teknologi informasi dalam konteks organisasi sektor publik. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan selama periode Desember 2025 hingga Maret 2026.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan, yaitu Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Subbagian Program dan Anggaran. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa kedua informan memiliki pengetahuan dan tanggung jawab yang relevan terhadap sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, laporan keuangan, prosedur operasional, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, transparansi keuangan, dan pengendalian internal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses penerimaan kas, pemanfaatan teknologi informasi, mekanisme pengendalian internal, serta praktik transparansi keuangan. Observasi dilakukan untuk memahami pelaksanaan sistem penerimaan kas dalam lingkungan kerja organisasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik thematic coding yang meliputi empat tahapan, yaitu open coding, axial coding, selective coding, dan penarikan tema utama. Pada tahap open coding, data hasil wawancara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan konsep-konsep yang muncul. Tahap axial coding dilakukan untuk menghubungkan kategori-kategori yang memiliki keterkaitan makna. Selanjutnya, selective coding digunakan untuk mengintegrasikan kategori-kategori utama sehingga membentuk tema penelitian yang lebih komprehensif. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan tema-tema yang terbentuk untuk menjelaskan peran transformasi digital sistem penerimaan kas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengendalian Internal melalui Ketepatan Waktu Penyetoran Kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kas pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang diwajibkan untuk segera disetorkan ke bank sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut diawasi oleh bendahara penerimaan dan bagian keuangan sehingga setiap transaksi dapat dipantau mulai dari penerimaan hingga penyetoran. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem penerimaan kas

berbasis teknologi informasi telah mendukung disiplin pengelolaan kas dan memperkuat pengendalian internal organisasi. Menurut Mulyadi (2016), salah satu unsur penting dalam sistem penerimaan kas adalah penyetoran kas secara tepat waktu untuk mengurangi risiko penyalahgunaan aset. Ketepatan waktu penyetoran juga merupakan bagian dari aktivitas pengendalian sebagaimana dijelaskan dalam kerangka COSO (2013), yang menekankan pentingnya prosedur pengawasan dalam menjaga keamanan aset organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yang (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi sistem keuangan mampu meningkatkan pengawasan transaksi dan meminimalkan keterlambatan pelaporan keuangan. Penelitian Du (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam sistem keuangan meningkatkan kemampuan organisasi dalam memonitor transaksi secara real-time sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, ketepatan waktu penyetoran kas tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administrasi, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian yang berkontribusi terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

2. Kelengkapan Bukti Transaksi sebagai Sarana Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penerimaan kas didukung oleh dokumen yang lengkap, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Bukti transaksi tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan, verifikasi, dan audit sehingga seluruh transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Menurut Romney dan Steinbart (2018), dokumentasi transaksi merupakan komponen utama dalam sistem informasi akuntansi karena berfungsi sebagai sumber data yang menjamin validitas dan reliabilitas informasi keuangan. Keberadaan bukti transaksi yang lengkap juga mendukung terciptanya *audit trail* yang memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara lebih efektif.

Temuan ini mendukung penelitian Inggriani (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan transaksi mampu meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Penelitian Alassuli (2025) juga menemukan bahwa organisasi yang menerapkan dokumentasi digital memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang masih menggunakan sistem manual. Dengan adanya bukti transaksi yang lengkap dan terdokumentasi secara sistematis, Pengadilan Tinggi Agama Kupang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan penerimaan kas serta memperkuat kepercayaan terhadap informasi keuangan yang dihasilkan.

3. Pemisahan Fungsi sebagai Upaya Pencegahan Risiko Kecurangan

Penelitian menemukan bahwa terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang menerima kas, melakukan pencatatan, dan melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pemisahan fungsi merupakan unsur utama dalam pengendalian internal yang efektif. Seseorang yang menerima kas seharusnya tidak memiliki kewenangan penuh untuk mencatat dan mengotorisasi transaksi yang sama karena dapat meningkatkan risiko fraud.

Temuan ini konsisten dengan penelitian COSO (2013) yang menegaskan bahwa segregasi tugas merupakan salah satu aktivitas pengendalian yang paling efektif dalam mencegah kesalahan maupun penyalahgunaan aset. Hasil penelitian juga mendukung temuan Yang (2024) yang menunjukkan bahwa organisasi dengan pemisahan fungsi yang jelas memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik

dibandingkan organisasi yang belum menerapkan pengendalian internal secara memadai. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi berperan penting dalam menjaga integritas proses keuangan organisasi.

4. Aksesibilitas Informasi sebagai Wujud Transparansi Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan melalui berbagai media yang disediakan institusi, terutama melalui website resmi dan sarana informasi lainnya. Selain itu, institusi berupaya menyajikan informasi secara sederhana sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi keuangan ditunjukkan oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik. Informasi yang tersedia harus mudah diakses, mudah dipahami, dan disampaikan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Du (2024) yang menemukan bahwa penggunaan platform digital mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah. Penelitian Alassuli (2025) juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan publik.

5. Keandalan Informasi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan telah disusun berdasarkan bukti transaksi yang sah dan mengikuti standar yang berlaku sehingga informasi yang dihasilkan dianggap cukup akurat dan dapat dipercaya. Menurut Romney dan Steinbart (2018), kualitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dari kemampuan sistem menghasilkan informasi yang relevan, andal, akurat, dan tepat waktu. Informasi yang memenuhi karakteristik tersebut akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta memperkuat akuntabilitas organisasi.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Alassuli (2025) yang menyatakan bahwa kualitas informasi keuangan yang tinggi memiliki hubungan positif dengan tingkat transparansi organisasi. Hasil penelitian juga sejalan dengan Du (2024) yang menemukan bahwa keandalan informasi keuangan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi publik. Keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan organisasi.

6. Partisipasi Publik melalui Komunikasi Dua Arah

Penelitian menemukan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang menyediakan berbagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun saran terkait pengelolaan keuangan. Saluran komunikasi tersebut dilakukan melalui forum resmi, layanan informasi, dan media komunikasi lainnya. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Komunikasi dua arah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih efektif antara organisasi dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Inggriani (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi sektor publik. Hasil penelitian juga mendukung Alassuli (2025) yang menemukan bahwa organisasi yang membuka ruang komunikasi dengan masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, partisipasi publik melalui

komunikasi dua arah menjadi elemen penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan kas.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan lembaga. Transformasi digital mendukung pengendalian internal melalui ketepatan waktu penyetoran kas, kelengkapan bukti transaksi, serta pemisahan fungsi yang jelas antara pihak yang menerima, mencatat, dan mengawasi penerimaan kas. Selain itu, sistem berbasis teknologi informasi juga meningkatkan transparansi keuangan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, penyajian informasi yang jujur dan dapat dipercaya, serta tersedianya mekanisme komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan informasi keuangan disajikan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Tinggi Agama Kupang disarankan untuk terus mengembangkan sistem penerimaan kas berbasis teknologi informasi yang lebih terintegrasi agar proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penguatan pengendalian internal perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pemisahan tugas yang jelas, peningkatan pengawasan terhadap penyetoran kas, serta optimalisasi dokumentasi transaksi, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Transparansi informasi keuangan juga perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan website resmi dan platform informasi publik lainnya agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan akurat. Di samping itu, komunikasi dua arah dengan masyarakat perlu dioptimalkan melalui penyediaan saluran pengaduan, forum konsultasi, dan media komunikasi digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya serta melibatkan informan yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan selama proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan sektor publik.

Daftar Pustaka

Alassuli, A. (2025). The impact of accounting digital transformation on transparency in finance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 272. <https://doi.org/10.3390/jrfm18050272>

- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Revista Administratie si Management Public*, 36, 149-164. <https://doi.org/10.24818/amp/2021.36-09>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Du, X. (2024). Is digital finance always beneficial to accounting information transparency? *Journal of Accounting and Finance Studies*, 12(3), 45-59.
- Hochstetter, J., Vásquez, F., Diéguez, M., Bustamante, A., & Arango-López, J. (2023). Transparency and e-government in electronic public procurement as sustainable development. *Sustainability*, 15(5), Article 4672. <https://doi.org/10.3390/su15054672>
- Inggriani, Y. (2021). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan kas. *KHITMAH: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 101-112.
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, Article 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Lestari, P. A. (2025). Transparency and accountability in the digital era: Insights from public sector accounting transformation. *International Journal of Accounting and Taxation*, 2(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Matheus, R., Janssen, M., & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government. *Government Information Quarterly*, 38(1), Article 101550. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (Edisi ke-4). Salemba Empat.
- Pertiwi, B. C., Sofiani, V., & Martasela, E. (2024). Analysis of the cash receipts accounting information system in improving the internal control system at PT. BPR Supra Artapersada KPO. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 4(2). <https://doi.org/10.47679/jrssh.v4i2.146>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson Education.
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. *Amkop Management Accounting Review*, 3(2), 90-106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Yang, C. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on transparency. *Technological Forecasting and Social Change*, 198, 123456.